

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.1.1 Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

Kewo dan Afiah (2017) *define* “*the quality of the financial statements as reported in accordance accounting standars of financial reporting which shows the financial position and results of operations of an entity at the end of the period*”.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan daerah dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Berdasarkan PSAP No.1 paragraf 9 (PP No.71 tahun 2010) dijabarkan bahwa:

Tujuan umum laporan keuangan merupakan penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat untuk para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara lebih khusus, tujuan pelaporan keuangan pemerintah yaitu untuk menyajikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyajian keuangan yang terbuka kepada publik akan menjadi alat ukur kinerja manajemen di pemerintah daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan daerah serta semakin sesuai dengan SAP maka akan meningkatkan transparansi laporan keuangan karena akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi alat ukur kinerja daerah (Apriliani, et al., 2015: 8)

Kualitas penyajian laporan keuangan ini merupakan suatu ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ukuran normatif tersebut terdapat pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang disajikan pada PP 71 Tahun 2010 yang meliputi :

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang terdapat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini. Informasi yang relevan mencakup, memiliki manfaat umpan balik, tepat waktu, dan lengkap.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, seperti penyajian yang jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

4. Dapat dipahami

Laporan keuangan yang disajikan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut :

a. Laporan realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur sebagai berikut :

1. Pendapatan LRA
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/defisit LRA
5. Pembiayaan
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Saldo anggaran lebih awal
2. Penggunaan saldo anggaran lebih
3. Sisa lebih.kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
5. lain-lain
6. Saldo anggaran lebih akhir

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai berikut :

1. Kas dan setara kas
2. Investasi jangka pendek
3. Piutang pajak dan bukan pajak

4. Persediaan
 5. Investasi jangka panjang
 6. Aset tetap
 7. Kewajiban jangka pendek
 8. Kewajiban jangka panjang
 9. Ekuitas
- d. Laporan operasional
Laporan operasional menyajikan pos-pos antara lain:
1. Pendapatan LO dari kegiatan operasional
 2. Beban dari kegiatan operasional
 3. Surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional
 4. Pos luar biasa
 5. Surplus/defisit LO
- e. Laporan arus kas
Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- f. Laporan perubahan ekuitas
Laporan perubahan ekuitas menyajikan pos-pos terdiri dari:
1. Ekuitas awal
 2. Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
 3. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas
 4. Ekuitas akhir
- g. Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut seperti, informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, informasi tentang kebijakan fiskal.keuangan, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi, dan informasi yang tidak terdapat di laporan keuangan lainnya.

Berdasarkan teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas penyajian laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mengelola keuangan yang diperlukan oleh masyarakat dan para stakeholder lainnya dalam mengumpulkan dan mendapatkan sebuah informasi keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yang disajikan secara relevan, andal, mudah dipahami dan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya

2.1.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan media pendukung dalam menjalankan kerangka kerja lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sector

public. Aksesibilitas juga akan mempengaruhi pada seberapa banyak akses informasi keuangan local yang telah dilakukan. (Apriliani,et al.,2015;3).

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan akses yang mudah bagi pengguna laporan keuangan, tidak hanya untuk lembaga legislative dan pengawas tetapi juga untuk semua masyarakat yang telah memberi mereka kepercayaan mereka untuk mengelola dana publik. (Lewier dan Kurniawan,2016;4)

Ketika laporan keuangan daerah dapat dipublikasikan secara terbuka melalui media massa, para pengguna semakin mudah memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah, semakin cepat dan mudah masyarakat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website), serta dapat dipahami dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan daerah, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah cenderung semakin baik pula (Lewier dan Kurniawan, 2016: 11).

Fauziah (2017:4) menyatakan bahwa “Aksesibilitas memiliki arti yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan”.

Indikator dari aksesibilitas menurut Apriliana (2019:116) yaitu :

1. Keterbukaan informasi bagi masyarakat
2. Mudah diakses
3. ketersediaan informasi keuangan

Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan merupakan suatu proses pengungkapan yang memberi kemudahan bagi seseorang untuk mengakses informasi mengenai laporan keuangan. Yang dapat diakses dari website, media televise, Koran, majalah dan lainnya.

2.1.3 Kapasitas Aparatur Desa

Triyono dkk (2019:122) states that capacity is “an ability possessed by an individual of an organization or a system in carrying out its functions effectively,

efficiently, and sustainably in accordance by applicable regulations to achieve common goals in development”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa bahwa :

Aparatur desa adalah semua unsur yang memiliki peran penting dan terlibat dalam lingkungan dan aktivitas desa. susunan organisasi aparatur desa terdiri dari kepala desa dibantu dengan perangkat desa. Yang dimaksud dengan perangkat desa yaitu sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan, pelaksana kewilayahan, dan pelaksanaan teknis meliputi kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan dan kepala seksi pelayanan.

Menurut Triyono, dkk (2019:123) Kapasitas aparatur desa harus memiliki 9 Karakteristik yang terpenting yaitu understanding (pemahaman), attitudes (etika dan norma), Abilities (kemampuan), values (penilaian) , relationships (hubungan), behavior (tingkah laku), resources (sumber daya), and motivation (motivasi).

Berdasarkan tinjauan di atas, maka dapat disimpulkan kapasitas aparatur desa merupakan ukuran kemampuan yang dimiliki seseorang dalam lingkungan desa yang dinilai berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan etika dari aparatur desa tersebut. Kapasitas aparatur desa tersebut sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa agar dapat dipertanggungjawabkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.

2.1.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, bahwa “sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah”.

Berdasarkan PP No.60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, SPIP terdiri atas 5 unsur yaitu :

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif.

2. Penilaian risiko

Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah harus menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan.

3. Kegiatan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib melaksanakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian review atas kinerja instansi,

4. Informasi dan komunikasi

Inti dari informasi dan komunikasi yaitu manajemen dan karyawan mendapatkan informasi dan komunikasi dengan atasan atau rekan kerja untuk memahami tugas dan tanggungjawab sistem pengendalian secara baik.

5. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Sistem pengendalian intern pemerintah menurut Mahmudi (2018;251) yaitu “bagian integral dari sebuah sistem akuntansi pemerintahan, instansi pemerintah harus membangun dan mempunyai sistem pengendalian yang baik”.

Sistem pengendalian intern pemerintah menurut Mahmudi (2018;252) bertujuan untuk :

1. Melindungi aset negara baik aset dalam bentuk fisik maupun data
2. Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat
3. Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal
4. Memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi
6. Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Government internal control system is expected to create conditions in which there is a culture of supervision of all organizations and activities so that it can detect the occurrence early on the possibility of irregularities and minimize the occurrence of actions that can harm the country (Triyono, dkk, 2019 :122)

Berdasarkan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah merupakan proses pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas pemerintah yang mempunyai tujuan untuk menjaga proses kegiatan dalam pencapaian akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan fungsi pemerintah berupa pengaman aset pemerintah dan ketaatan terhadap undang-undang.

2.1.5 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas publik menurut Sujarweni (2015:28) yaitu “kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan segala kegiatannya yang menjadi kewajibannya kepada pihak pemberi amanah”.

Akuntabilitas harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (Martini, dkk, 2019 :111).

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa “akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, menyebutkan bahwa :

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan desa harus berdasarkan asas akuntabel, transparansi, partisipatif serta tertib dan disiplin terhadap anggaran. Untuk menciptakan pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa dituntut memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan keuangan, salah satunya yaitu adalah asas akuntabel.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan.

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Perbup Musi Rawas No.3 tahun 2019).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa menurut Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola sumber daya kekayaan suatu desa serta keseluruhan kegiatan pemerintah desa dalam hal :

1. Perencanaan,
2. Pelaksanaan,
3. Penatausahaan,
4. Pelaporan pertanggungjawaban, dan
5. Pengawasan

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban dari pemanfaatan sumber daya yang ada berupa informasi keuangan dana desa dan kinerja pegawai kepada pihak yang berkepentingan yang membutuhkan informasi tersebut guna pencapaian tujuan pemerintah desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, kapasitas aparatur desa, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diuraikan dalam tabel 2.1.

Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Triyono, Fatchan achyani, Nufti arief arfiansyah (2019)	The detereminant accountability of village funds management	X1 : presentation of financial statement (penyajian laporan keuangan) X2 : accessibility of financial reports (aksesibilitas laporan keuangan) X3 : quality of Bpd supervision (kualitas pengawasan badan permusyawarahan desa) X4 : capacity of village apparatus (kapasitas aparat desa) X5 : village financial system (sistem keuangan desa) X6 : government internal control system (sistem pengendalian internal	Secara parsial : X1 : penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa X2 : aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa X3 : kualitas pengawasan badan permusyawarahan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa X4 : kapasitas aparat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

			<p>pemerintah)</p> <p>Y : accountability of village funds management (akuntabilitas pengelolaan dana desa)</p>	<p>X5 : sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p> <p>X6 : sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p> <p>Secara simultan :</p> <p>penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, kualitas pengawasan badan permusyawarahan desa, kapaitas aparat desa, sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>
2.	SiskaWahyuni, Novita Indrawati, Al Azhar L (2018)	Pengaruh sistem pengendalian intern, sistem informasi Akuntansi, dan kompetensi aparat	<p>X1 : Sistem pengendalian intern</p> <p>X2 : Sistem informasi akuntansi</p> <p>X3 : Kompetensi aparat</p> <p>Y : Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa</p>	<p>Secara parsial :</p> <p>X1 : sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa</p> <p>X2 : sistem informasi akuntansi</p>

		terhadap Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa		berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa X3 : kompetensi aparat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa Secara simultan : Sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi dan kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
3.	Rita Martini, naufal Lianto, Sukmini Hartati, Zulkifli, Endah Widyastuti (2019)	Pengaruh Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sembawa	X1 : sistem pengendalian intern pemerintah. Y : akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4.	Nur Azizah, Junaidi, Achidar	Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas	X1 : penyajian laporan keuangan X2 : aksesibilitas laporan keuangan	Secara parsial : X1 : penyajian laporan keuangan tidak

	Redy Setiawan (2015)	laporan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah sebagai determinan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	X3: sistem pengendalian intern pemerintah Y1 : transparansi pengelolaan keuangan daerah Y2 :akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah X2 :aksesibilitas laporan keuangan berpegaruh terhadap transparansi tetapi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah X3 : sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap transparansi tetapi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Secara simultan : Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
--	----------------------	--	---	--

6.	Anim Rahmayati, dan Ema Tietien Chrystiana (2019)	Transparency and accountability of village fund allocation management in Wironanggan	X1 : Presentation of financial statement (penyajian laporan keuangan) X2 : accesibility (aksesibilitas) X3 : Functional supervision (pengawasan fungsional) Y1 : Tranparency of village fund allocation management (tranparansi pengelolaan alokasi dana desa) Y2 : accountability of village fund allocation management (akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa)	Secara parsial : X1 : penyajian laporan keuangan tidka berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa, tetapi penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. X2 : aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. X3 : pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa, tetapi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
7.	Salomi J. Hehanussa (2015)	Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan	X1 : penyajian laporan keuangan X2 : aksesibilitas laporan keuangan Y1 : Transparansi pengelolaan	Secara parsial : X1 : Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan

		keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	keuangan daerah Y2 : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah X2 : Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Secara simultan : penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
8.	Baiq Nurrizkiana, Lilik handayani dan Erna Widyastuti (2017)	Determinan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan implisterhadap kepercayaan publik	X1 : penyajian laporan keuangan X2 : aksesibilitas laporan keuangan Y1 : transparansi pengelolaan keuangan daerah Y2 : akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Secara parsial : X1 : penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah X2 : aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan

				<p>terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>Secara simultan :</p> <p>penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>
9.	Mualifu, Ahmad Guspul, Hermawan (2019)	Pengaruh transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pemernitah desa dalam mengelola Alokasi dana desa	<p>X1 : Transparansi</p> <p>X2 : Kompetensi</p> <p>X3 : Sistem pengendalian internal</p> <p>X4 : komitmen organisasi</p> <p>Y : Akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa</p>	<p>Secara parsial :</p> <p>X1 : Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.</p> <p>X2 : Kompetensi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.</p> <p>X3 : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa</p>

				<p>dalam mengelola alokasi dana desa.</p> <p>X4 : Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.</p> <p>Secara simultan :</p> <p>Transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.</p>
10.	Isna Apriliana (2019)	Determinan Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat	<p>X1 : Penyajian laporan keuangan</p> <p>X2 : aksesibilitas laporan keuangan</p> <p>X3 : mekanisme pengawasan</p> <p>Y1 : transparansi pengelolaan alokasi dana desa</p> <p>Y2 : akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa</p>	<p>Secara parsial :</p> <p>X1 : penyajian laporan keuangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, dan penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana</p>

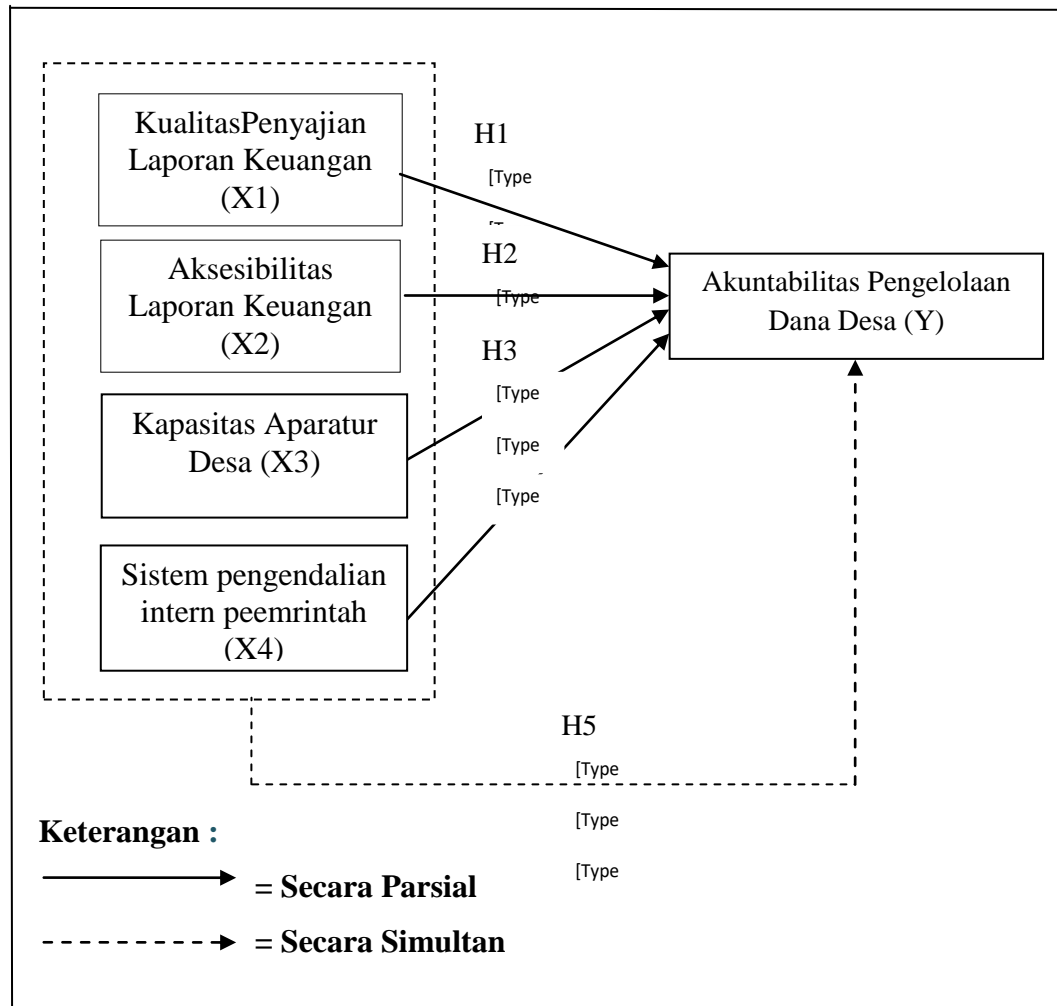
				<p>desa.</p> <p>X2 : aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, tetapi aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa.</p> <p>X3 : mekanisme pengawasan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.</p> <p>Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat, tetapi transparansi berpengaruh negatif terhadap kepercayaan masyarakat.</p>
11.	Faza Meila Fauzzani, Atiek Sri Purwati dan Sudjono (2018)	Analisis persepsi penyajian laporan keuangan pertanggungjawaban dan	X1 : penyajian laporan keuangan pertanggungjawaban X2 : aksesibilitas Y1 : transparansi pengelolaan dana	Secara parsial : X1 : penyajian laporan keuangan pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan

		aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa	desa Y2: akuntabilitas pengelolaan dana desa	akuntabilitas pengelolaan dana desa X2 : aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Secara simultan : penyajian laporan keuangan pertanggungjawaban dan aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
--	--	--	--	---

Sumber data : *google scholar* diolah 2020

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka peneliti akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Sumber : Data yang diolah, 2020

Gambar 2.1
Skema Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar diatas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu kualitas penyajian laporan keuangan (X1), aksesibilitas laporan keuangan (X2), kapasitas aparatur desa (X3), dan sistem pengendalian intern pemerintah (X4) berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Diduga kualitas penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial.
- H2 : Diduga aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial.
- H3 : Diduga kapasitas aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial.
- H4 : Diduga sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial.
- H5 : Diduga penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, kapasitas aparatur desa, dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara simultan.